Jurnal Publication Research of Public Policy and Administration Governance dan Administrasi Publik

ISSN: E-ISSN:

ANALISIS KINERJA PEGAWAI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA LUBUK LINGGAU

Ruddy Wijaya [1]

Achmad Aminudin [2]

[1] *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu*

[2] *Magister Public Administration, Faculty of Social Science And Political Science, University of Bengkulu*

[1] *E-mail: ruddywijaya45@yahoo.com* [2] *E-mail: achmad.aminudin.unib@gmail.com*

ARTICLE HISTORY

Received: February 00, 00
Revised: March 00, 00
Accepted: March 00, 00
Available online: April 00, 00

KEYWORDS

Performance, Employees, General Election Commission

This is an open access article under the CC–BY-SA license

ABSTRAK

Tujuan Penelitian ini adalah untuk Mengetahui kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau. Data primer yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang berkaitan dengan kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya dilihat dari pelaksanaan fungsinya. Kurang berjalannya mekanisme evaluasi dan teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, atau penyelewengan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan berpotensi memperlemah tanggung jawab pegawai terhadap tugas pekerjaan yang embannya. Sesuai penelitian, bahwa tingginya kuantitas hasil kerja di Komisi Pemilihan Umum ditandai dengan rendahnya tingkat hambatan yang dialami oleh pegawai dalam melaksanakan tugasnya, tingginya capaian pekerjaan yang dapat direalisasikan dan efektivitas hasil pekerjaan terhadap sasaran yang ingin dicapai. Rendahnya hambatan pekerjaan, tingginya capaian dan efektivitas pekerjaan dapat berpengaruh terhadap optimalisasi hasil pekerjaan, sehingga secara kuantitatif meningkat. Dengan demikian kondisi ini memiliki daya pengungkit bagi peningkatan kinerja pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau. Hal ini dapat memperlemah terhadp kinerja pegawai secara kolektif. kategorisasi kinerja Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau dapat diinterpretasikan bahwa secara umum kinerja pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau tergolong tinggi. Tingginya kinerja pegawai tersebut dapat dilihat dari Lima aspek penelitian, yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, tanggung jawab dan Kemampuan kerja sama serta Inisiatif Kerja. Dan tingginya kinerja pegawai di Komisi Pemilihan Umum ditandai dengan sangat tingginya kualitas hasil kerja dan prosedur kerja.

ABSTRACT

The purpose of this study is to determine the performance of the employees of the General Election Commission of Lubuklinggau City. Primary data to be collected in this study are data related to the performance of the General Election Commission employees of Lubuklinggau City and the factors that can influence it seen from the implementation of its function. The lack of functioning of the evaluation mechanism and warning against employees who commit violations, deviations, or deviations from the stipulated provisions has the potential to weaken the responsibility of employees for the job duties they carry. According to the research, the high quantity of work results in the General Election Commission is marked by the low level of obstacles experienced by employees in carrying out their duties, the high work achievements that can be realized and the effectiveness of the work results against the targets to be achieved. Low job barriers, high performance and job effectiveness can affect the optimization of work results, thereby increasing quantitatively. Thus, this condition has leverage for the improvement of employee performance in the General Election Commission of Lubuklinggau City. It can weaken the performance of employees collectively. The categorization of the performance of the General Election Commission employees of the City of Lubuklinggau can be interpreted that in general the performance of the employees of the General Election Commission of the City of Lubuklinggau is classified as high. The high performance of these employees can be seen from five aspects of research, namely the quality of work results, quantity of work results, responsibility and ability to work together as well as work initiatives. And the high performance of employees at the General Election Commission is marked by the very high quality of work results and work procedures.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum menjadi salah satu indikator stabil dan dinamisnya demokratisasi suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, akan tetapi proses demokratisasi lewat pemilu-pemilu yang terdahulu belum mampu menghasilkan menemukan format demokrasi yang ideal mulai nampak setelah penyelenggaraan pemilu 2004 lalu yang berjalan relatif cukup lancar dan aman. Untuk ukuran bangsa yang baru beberapa tahun lepas dari system otoritarian, penyelenggaraan pemilu 2004 yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden secara langsung yang berjalan tanpa tindakan kekerasan dan chaos menjadi prestasi bersejarah bagi bangsa ini.

Kinerja (performance) dengan prestasi kerja yaitu proses melalui upaya organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Faustino Cardosa Gomes (1995) yang dikutif Anwar Prabu (2005) mengemukakan definisi kinerja karyawan sebagai: Ungkapan seperti output, efisiensi serta efektivitas sering dihubungkan dengan produktivitas.

Selanjutnya, definisi kinerja karyawan menurut Anwar Prabu (2005) bahwa Kinerja karyawan (prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari konsep di atas dapat dipahami bahwa kinerja adalah seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaian tujuan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau. Ruang lingkup penelitian difokuskan pada kinerja pegawai Kantor

Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau yang dilihat dalam 5 indikator yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, tanggung jawab, Kemampuan kerja sama dan Inisiatif. Informasi di lapangan diperoleh melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Informan dan Key Informan di KPU Kota Lubuklinggau terdiri dari Sekretaris, Kepala Subbagian Hukum, Kepala Subbagian Program, Kepala Subbagian Teknis, Kepala Subbagian Umum. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tugas dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau

KPU Kota Lubuklinggau memiliki visi menjadi penyelenggaran Pemilu Legislatif, Pilpres, Pemilu Kepala Daerah yang damai, serta memiliki misi:

1. Mewujudkan pemahaman tentang hak dan kewajiban politik rakyat Kota

Doi: https://doi.org/10.31186/IJPPA.

Lubuklinggau untuk berpatisipasi aktif dalam Pemilu, Pilpres dan Pemilu Kepala Daerah sesuai asas Pemilu yang bersendikan religius.

2. Melayani dan memperlakukan setiap peserta pemilu secara adil, setara, serta menegakkan pemilu/ pilpres/ pemilu kepala daerah secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang – undangan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Lubuklinggau merupakan bagian dari Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Nasional dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetap dimaksudkan bahwa Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga, menjalankan tugasnya secara berkesinambungan meskipun keanggotaannya dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sedangkan mandiri dimaksudkan bahwa dalam penyelenggaraan dan melaksanakan Pemilihan Umum bersikap mandiri dan bebas dari pengaruh manapun disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Perundang–undangan. Selain melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban tersebut diatas Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau juga diberi wewenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 danUndang-Undang Nomor 22 Tahun 2007.

Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

a. merencanakan program, anggaran, dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPUKabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
c. menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan pemilu kepala daerah provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan
d. mengorganisasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggarakan pemilu kepala daerah kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU.
e. Memuktahirkan data pemilih dari berasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih
f. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
g. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan
h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi perhitungan suara pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;
j. menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

k. menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
l. mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaranya;
m. melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU;
n. memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etikyang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
o. menindaklanjuti dengan segala temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi
p. menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sektretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan.

Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas:

a. memimpin rapat pleno dan seluruh kegiatan KPU, KPU Provinsi, danKPU Kabupaten/Kota;
b. bertindak untuk dan atas nama KPU, KPU Provinsi, dan KPUKabupaten/Kota ke luar dan ke dalam;
c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU,KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
d. menandatangani seluruh peraturan dan keputusan KPU, KPU Provinsi,dan KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 622 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, maka Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Kabupaten / Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi sedangkan dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris KPU Kabupaten / Kota secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota. Tugas Pokok Sekretariat KPU Kabupaten / Kota adalah melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten/ kota.

Dalam melaksanakan tugas Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan program dan anggaran Pemilu di Kabupaten / Kota ;
b. Pemberian pelayanan teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten /Kota ;
c. Pemberian pelayanan administrasi yang meliputi ketata usahaan, kepegawaian, anggaran dan perlengkapan ;
d. Perumusan dan penyusunan bantuan serta penyelesaian masalah dan sengketa hukum ;
e. Pemberian dan pelayanan informasi Pemilu, partisipasi masyarakat, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat bagi keperluan Pemilihan Umum di Kabupaten / Kota ;
f. Pengelolaan data Pemilu di Kabupaten / Kota ;
g. Pengelolaan logistik dan distribusi barang / jasa keperluan Pemilihan Umum
h. Pelaksanaan kerja sama antar lembaga ;

Doi: https://doi.org/10.31186/IJPPA.

i. Penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten / Kota.

Sedangkan Susunan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota dibawah Sekretaris sebagaimana dalam Keputusan KPU Nomor 622 Tahun 2003, terdiri dari :

a. Subbagian Program, mempunyai tugas: Menyiapkan penyusunan rencana, program, anggaran bersama dengan Subbagian Umum, pengumpulan dan pengolahan data kegiatan Pemilihan Umum.
b. Subbagian Teknis Penyelenggaraan, mempunyai tugas: Menyiapkan pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilihan Umum dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu.
c. Subbagian Hukum dan Hubungan Masyarakat, mempunyai tugas : Melaksanakan inventarisasi, pengkajian, penyuluhan, bantuan, kerja sama antar lembaga dan penyelesaian sengketa hukum, pengawasan pelaksanaan rencana dan program serta melaksanakan pelayanan informasi, sosialisasi peraturan yang berkaitan dengan Pemilu dan peningkatan partisipasi masyarakat
d. Subbagian Umum, mempunyai tugas : Melakukan penyusunan anggaran bersama dengan Subbagian Program, perbendaharaan, verifikasi dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan dan distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

Dalam penelitian ini kinerja pegawai dilihat dari 5 (lima) indikator, yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, tanggung jawab dan Kemampuan kerja sama, Inisiatif. Maka hasil penelitian untuk masing-masing indikator dapat didiskripsikan sebagai berikut:

1. Kualitas Hasil Kerja

Kualitas hasil kerja yang terbina dengan baik disebabkan adanya komitmen pegawai terhadap sasaran organisasi (target oriented), loyalitas pegawai yang mendorong kesesuaian pelaksanaan tugas dengan arahan pimpinan, serta sistem reward sebagai bentuk dari kepuasan pimpinan terhadap prestasi para pegawai sehingga pegawai terpacu untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi.

2. Kuantitas Hasil kerja

Kuantitas hasil kerja yang memadai, disebabkan rendahnya resistensi pegawai dalam melaksanakan tugas, tingginya capaian pekerjaan yang dapat direalisasikan, serta efektivitas hasil pekerjaan dalam mencapai sasaran organisasi.

3. Tanggung Jawab

Tanggung jawab yang tinggi dari para pegawai, disebabkan adanya pemahaman dan konsistensi pegawai terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi jarangnya pimpinan dalam memberi teguran (evaluasi) terhadap berbagai kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai berpotensi terhadap melemahnya rasa tanggung jawab pegawai.

4. Kemampuan Kerja Sama

Kemampuan Kerjasama, Indikator kemampuan kerja dilihat dari parameter yaitu Kemampuan Kerja sama dengan rekan dan Komunikasi yang baik dan efektif.

5. Inisiatif

Inisiatif, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Walyusman, S.Sos menjelaskan bahwa mayoritas pegawai yang ada di KPU Lubuklinggau mempunyai inisiatif yang besar namun memnag tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat beberapa orang pegawai yang kurang adanya inisatif dalam melaksanakan pekerjaannya, artinya

bahwa kegiatan dan tugas, fungsi dari masing-masing subbagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau telah terlaksana oleh karena adanya inisiatif dari sebagian besar pegawai dalam menciptakan strategi mantap dalam pelaksanaan Pemilu serta menghadapi masalah dalam bekerja.

Indikator lain yang dapat dijadikan sebagai ukuran untuk melihat kinerja pegawai adalah implementasi prosedur kerja yang ada. Sesuai penelitian ini dapat diinterpretasikan, bahwa sangat tingginya implementasi prosedur kerja di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau ditunjang sangat tingginya kepatuhan pegawai terhadap prosedur kerja, pemahaman pegawai terhadap prosedur kerja, kesediaan pegawai dalam melalukan langkah-langkah perbaikan apabila pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.

Kurang berjalannya mekanisme evaluasi dan teguran terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran, penyimpangan, atau penyelewengan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan berpotensi memperlemah tanggung jawab pegawai terhadap tugas pekerjaan yang embannya. Hal ini dapat memperlemah terhadp kinerja pegawai secara kolektif.

PENUTUP

Secara umum kinerja pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau termasuk tinggi, ditandai adanya faktor:

a. Kualitas hasil kerja yang terbina dengan baik disebabkan adanya komitmen pegawai terhadap sasaran organisasi (target oriented), loyalitas pegawai yang mendorong kesesuaian pelaksanaan tugas dengan arahan pimpinan, serta sistem reward sebagai bentuk dari kepuasan pimpinan terhadap prestasi para pegawai sehingga pegawai terpacu untuk melakukan pekerjaan lebih baik lagi.
b. Kuantitas hasil kerja yang memadai, disebabkan rendahnya resistensi pegawai dalam melaksanakan tugas, tingginya capaian pekerjaan yang dapat direalisasikan, serta efektivitas hasil pekerjaan dalam mencapai sasaran organisasi.
c. Tanggung jawab yang tinggi dari para pegawai, disebabkan adanya pemahaman dan konsistensi pegawai terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Tetapi jarangnya pimpinan dalam memberi teguran (evaluasi) terhadap berbagai kekeliruan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai berpotensi terhadap melemahnya rasa tanggung jawab pegawai.
d. Kemampuan Kerjasama, Indikator kemampuan kerja dilihat dari parameter yaitu Kemampuan Kerja sama dengan rekan dan Komunikasi yang baik dan efektif. Dan dapat disimpulkan bahwa secara garis besar pegawai di Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau dapat bekerja sama dengan baik dan lancar dengan menggunakan komunikasi yang baik dan dapat dipahami oleh orang lain. Demi tercapainya visi dan misi dari Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau.
e. inisiatif, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau Walyusman, S.Sos menjelaskan bahwa mayoritas pegawai yang ada di KPU Lubuklinggau mempunyai inisiatif yang besar namun memang tidak dapat dipungkiri juga bahwa terdapat beberapa orang pegawai yang kurang adanya inisatif dalam melaksanakan pekerjaannya, artinya bahwa kegiatan dan tugas, fungsi dari masing-masing subbagian di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Lubuklinggau telah terlaksana oleh karena adanya inisiatif dari sebagian besar pegawai dalam menciptakan strategi mantap

Doi: https://doi.org/10.31186/IJPPA.

dalam pelaksanaan Pemilu serta menghadapi masalah dalam bekerja.

REFERENSI

Ahmad Nadir, 2005, *Pilkada Langsung dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia*, Penerbit Averroes Press, Malang.

Arikunto, Suharsimi, 2005. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, Edisi Revisi, Rhineka Cipta, Yogyakarta.

Peraturan KPU, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang penyerelenggara pemilihan umum

Handoko T.H dan Reksohadiprodjo, 2000. *Organisasi Perusahaan Teori: Struktur dan Perilaku*, BPFE, Yogyakarta.

Modul Pengawasan, 2009, *Badan Pengawas Pemilu-Indonesia Corruption Watch,* Jakarta.

Pedoman Pengawasan Pemilu 2009, 2009, Bawaslu RI, Jakarta.

Ramlan Surbakti dkk, 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Partnership for Governance Reform Indonesia, Jakarta.

Sigit Putranto dan Kusumowidagdo, 1981, *Sistem Pemilihan Umum Universal dan Parohial*, Prisma (9).

Singarimbun, Masri, dan Sofyan Effendi, 1998. *Metode Penelitian Survei*, LP3ES Jakarta.

Surakhmad, Winarno, 1999. *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Tarsito, Bandung.

Thoha, Miftah, 1998. *Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya, Raja Grafindo Persada*, Jakarta.